KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA
(Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

ULIMA ISLAMI

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh
ULIMA ISLAMI

Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou dalam hal ini belum memiliki kemauan atau malas untuk menyelenggarakan tertib Administrasi di tingkat Desa. Hal ini diketahui dari masih banyak dokumen atau data-data mengenai administrasi desa yang tidak terisi atau tidak lengkap, padahal seharusnya buku untuk masing-masing administrasi desa tersebut terisi dengan lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas Aparatur Desa dalam tertib Administrasi Desa (Studi kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Kapasitas aparatur Desa dilihat dari tiga indikator yaitu, pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan informan yaitu Kepala Desa Tiuh Tohou, Seketaris Desa Tiuh Tohou, Perwakilan Masyarakat Desa Tiuh Tohou, Ketua BPD Desa Tiuh Tohou, Kepala Camat Menggala, Kepala Bagian Pemerintah Menggala, Kepala Urusan Pemerintah Desa Tiuh Tohou. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pada indikator pemahaman, semua informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Tiuh Tohou sudah cukup memahami buku-buku Administrasi Desa dan tata cara pengisian buku-buku tersebut namun aparatur Desa belum memiliki kemauan atau malas dalam pengisian buku-buku Administrasi Desa. Pada indikator keterampilan, sebagian informan tidak puas dengan keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou karena belum mampu mengaplikasikan buku-buku administrasi desa dan dinilai masih tidak teliti dan tangkas dalam pelaksanaan tertib Administrasi Desa meskipun sudah menjalakankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan Menggala. Pada indikator kemampuan menunjukan bahwa aparatur Desa belum mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa. Hal tersebut dilihat berdasarkan ketidakmauan aparatur Desa untuk menyusun rencana kegiatan terhadap tertib Administrasi Desa dan belum mampu untuk mempertanggungjawabkan hasil Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Menggala.

Kata Kunci: Kapasitas, Aparatur Desa, Tertib Administrasi Desa

ABSTRACT

The Village Officials Capacity in a Good Village Administration
(A Case Study in Tiuh Tohou Village, Meggala district, Tulang Bawang)

By

ULIMA ISLAMI

Village Administrative Capacity Tiuh Tohou in this case do not yet have the ability and willingness to organize an orderly administration at the village level. It is known from many documents or data on the administration of the village that are not filled or incomplete, when it should be a book for each village administration is filled completely. The purpose of this study was to determine the capacity of the village in an orderly Apparatus Village Administrative (Case Study in the village of Tiuh Tohou Menggala District of Tulang Bawang)

The capacity of the apparatus seen from the village of three indicators, namely, understanding, skills and abilities. This study uses qualitative research type, with informants that Village Head Tiuh Tohou, Secretary Tiuh Tohou Village, Village Community Representative Tiuh Tohou, Chairman of the Village BPD Tiuh Tohou, Head Menggala Head, Head of Government Menggala, Head of Government Affairs Tiuh Tohou village. Data were collected by interview and documentation, then the data were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the indicator of understanding, all the informants stated that the whole apparatus of the Village Tiuh Tohou is enough to understand the books of Village Administration and the procedures for filling the books but the village officials can not apply it in the charging books Village Administration. In indicator of skill, most informants are not satisfied with the skills of village officials Tiuh Tohou as judged still not rigorous and agile in implementing orderly despite menjalakankannya Village Administration in accordance with the guidelines given by the District Menggala. On the indicator shows that the ability of the apparatus Village did not have the ability to organize an orderly Village Administration. This can be seen by the inability of the village officials to develop a plan of activities on the Village Administration orderly and not being able to account for the results of the Village Administration to the Government of the District Menggala

Keywoord: Capacity, The Village Officials, a Good Village Administration

KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA

(Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh

Ulima Islami

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.** .....

   Penguji : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : **30 Mei 2016**

Judul Skripsi	:	**KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)**
Nama Mahasiswa	:	*Ulima Islami*
No. Pokok Mahasiswa	:	**1216021109**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah saya tulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai *acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam* daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia *menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas* Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2016

ernyataan,

Ulima Islami

NPM. 1216021109

RIWAYAT HIDUP

Ulima Islami, dilahirkan di Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada tanggal 11 juni 1994, merupakan putri dari pasangan Bapak Drs. Mahmud Ali dan Ibu Dra. Mega Suri Rivai Oelangan. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yakni Norberta Alda Sakti, Amd. S.st dan Mamelia Ceria Putri, SKM

Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan TK AL-Kautsar pada tahun 2000, dilanjtkan di Sekolah Dasar (SD) AL-Kautsar 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

MOTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah,6-8)

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Al-Baqarah: 153)

" Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan "

(Sir Winston Churchill)

"The best sword that you have is a limitless patience. (Pedang terbaik yang Anda miliki adalah kesabaran tanpa batas.)"

(Ulima Islami)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiral ALLAH SWT penguasa alam semesta, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat untuk senantiasa bertawakal.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk....

Kedua orang tuaku, Ibu yang telah melahirkan ku, yang selalu sabar dan mendoakan setulus hati disetiap langkahku, memberi nasihat serta semangat di kala ku terjatuh, Bu, kau sumber kekuatanku dalam menjalani hidup ini. Untuk Bapak yang senantiasa memberikan motivasi dalam setiap kehidupanku serta telah bersusah payah yang menjadikan tubuhnya yang gagah menjadi hitam dan keriput karena senantiasa mencari biaya untuk ku hingga aku telah menyelesaikan di perguruan tinggi Universitas Lampung.Untuk Ibu dan Bapak maaf karena aku belum bisa menanam bahagia di wajah kalian, maaf karena aku belum bisa menanam bangga di hati kalian, terimakasih kepada Ibu dan Bapak untuk cinta dan doa kepadaku.

Terimakasih untuk kedua kakak-kakak ku yang paling mengharukan saat berkumpul dengan kalian walaupun suka bertengkar tapi hal itu tidak bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan kalian serta sudah meberikan motivasi kepadaku dan menjadi teladan bagiku.

bapak pembimbing dan penguji yang selama initelah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik, terimakasih bapak pembimbing dan penguji jasa kalian akan selalu terpatri dihati.

Sahabat dan teman-teman ilmu pemerintahan yang sudahmemberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi tanpa semangat senyum dan doanya untuk keberhasilan ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangisan dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semu, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang sayang-sayangi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aminn

SANWACANA

Bismillahirahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahn-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rosulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Penulis skripsi ini berjudul "Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa(Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)" ini merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku dosen pembahas dan dosen penguji, terimakasih telah memberikan saran dan kritik, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini agar menjadi lebih baikterima kasih atas asupan semangat, waktu dan arahan serta atas kesabaran yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi yang sederhana ini, terimakasih banyak pak;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing Utama dan pembimbing akademik, terima kasih atas semangat, dan waktu, arahan, bimbingan, solusi dan masukan selama penulis menjalani proses bimbingan, terimakasih banyak pak;
4. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, Ibu Tabah, Ibu Ari Darmastuti, Ibu Dwi Wahyu, Pak Denden, Pak Sigit, Pak Budi Harjo, Pak Piping, Pak Budi Kurniawan, Pak Syafar, Pak Robi, Pak Wondo, Pak Himawan, Bang Ariska, dan Bang Darma serta dosen-dosenlain, terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan;
5. Seluruh staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Rianti, serta Staf FISIP Universitas lampung yang tak dapat ditulis satu persatu, terimakasih telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan;

6. Bapak Drs. Amantoto Dwiyono, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas bimbingan yang anda memberikan bimbingan arahan dan kesabaran serta masukan yang telah diberikan kepada saya.

7. Ibu Dwi Wahyuhandayani, S.IP,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Rianti dan Staf Fisip Universitas Lampung tang tidak dapat ditulis satu persatu, terima kasih telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Peneliti mengucapkan terimaksih atas ilmu, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

10. Bapak Camat Menggala serta Jajarannya, terima kasih banyak atas bantuannya yang telah memberikan izin untuk penelitian di Desa Tiuh Tohou dan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kedua orangtuaku, yang telah membesarkanku, memdidik, membimbing serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk Ibu yang telah melahirkanku, yang senantiasa mendoakanku dalam setiap langkahku, maaf karena belum bisa mengukir kebahagiaan di wajah ibu, maaf untuk semua airmata yang kau tumpahkan karena aku, Bu, terimakasih untuk cinta dan doamu kepadaku. Untuk Bapak, yang yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan anaknya. Meski sikap Bapak terkadang keras, namun aku bangga karena dapat menuntun

aku menjadi sesosok wanita soleha. Terimakasih banyak pak. I Love You Mather and Father.

12. Untuk kakaku Norberta dan Mamelia terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini, kalian kakak-kakak yang terbaik yang aku punya.
13. Terimakasih untuk pacar, sahabat, kakak, teman, musuh yaitu Tri Umpu Kiraton yang sudah menemani saya dari awal kuliah sampai akhir kuliah dan rela menghabiskan waktu nya, pikiran , tenaga serta memberikan bimbingan kepada saya setiap hari untuk menjadi lebih baik lagi, dan tidak pernah meninggalkan saya di saat saya susah serta selalu ada buat saya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi disini karna terlalu banyak kebaikan kamu untuk saya, thankyou so much darl.
14. Sahabat-sahabat terbaiku dikampus yang selalu menemani dan berjuang bersama sama untuk meraih gelar SIP ini Tri Umpu Kiraton, Suci Pebrina, Astari Puja Seraya, Putri Agustin Darma Putri, Juni Renaldhu, Rendi Noverdi, Nora Hima, Metta Fitriani, terimakasih ataskebahagian canda tawa selama ini semoga kelak kita dapat mencapai kesukseskan bersama, Amin.
15. Sahabat, teman, saudara yang selalu ada disaat susah dan bahagia terimakasih sudah selalu ada buat aku Metta Yulenda, Fitri Amelia Sari, Ria Purwanti, Fetrian Briketya Ningrum, Istiqomah semoga kita selalu diberikan kesuksesan. Amin
16. Tema-teman sekolah menengah atas yang selalu memberikan motivasi tawa canda Adi Kurniawan, Satria Jaya, Endri Astomi, Pindondang, Isco,

Renaldi Triansyah, Sari Tirta, Kondang Wilopo, Dempo, Belardo, Cournolius, Jaka, Sasmi, Noni.

17. Teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, kenal kalian serasa punya keluarga baru dan sama-sama membagi pengalaman, makasih ya buat semuanya sukses buat kita semua. Aaamien

18. Seluruh keluarga besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2010, 2011, 20012, 2013, 2014, 2015, terimakasih atas kebersamaan yang pernah terjalin selama peneliti menempuh studi dikampus tercinta.

19. Berbagai pihak yang telah membantu baikm secara langsung maupun tidak langsung terujudnya kelulusan ini.

Allah Maha Melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaamin

Bandar Lampung, 30 Mei 2016
Peneliti

Ulima Islami

NPM: 1216021109

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kapasitas 8
B. Tinjauan Tentang Pengembangan Kapasitas 9
1. Pengertian Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) 9
2. Tujuan Pengembangan Kapasitas 12
3. Fokus Pengembangan Kapasitas 14
4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas 15
5. Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah 18
C. Tinjauan Tentang Kemampuan 22
1. Pengertian Kemampuan 22
D. Tinjauan Tentang Keterampilan 24
1. Pengertian Keterampilan 24
2. Dasar-dasar Keterampilan 26
E. Tinjauan Tentang Pemahaman 27
1. Pengertian Pemahaman 27
F. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa 28
1. Pengertian Pemerintahan 28
2. Pengertian Desa 30
3. Pemerintahan Desa 31
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 37
G. Tinjauan Tentang Tertib Administrasi Desa 43
1. Pengertian Administrasi 43
2. Pengertian Tertib Administrasi Desa 46
H. Kerangka pikir 48

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 51
B. Fokus Penelitian 52
C. Informasi Penelitian 53

D. Jenis Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Pengelolaan Data 56
G. Teknik Analisis Data 59

IV. GAMBARAN UMUM DANLOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Desa Tiuh Tohou 61
B. Sejarah Pemerintah Desa Tiuh Tohou 62
C. Keadaan Pemerintah Desa Tiuh Tohou 62
D. Luas Wilayah Desa Tiuh Tohou 63
E. Orbitasi Desa 63
F. Keadaan Penduduk 63
G. Mata pencaharian 64
H. Latar Belakang Pendidikan Penduduk 65
I. Sarana dan Prasarana Desa Tiuh Tohou 66
J. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tiuh Tohou 67
1. Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemrintah Desa 67
2. Keadaan Perangkat Desa 68
3. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tiuh Tohou 68
K. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Tiuh Tohou 69
L. Kondisi Kantor dan Sarana Pemerintahan Desa 71
M. Kondisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 72

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Informan 73
B. Hasil Penelitian 75
1. Pemahaman Aparatur Desa Terhadap Tertib Administrasi Desa 75
2. Keterampilan Aparatur Desa Terhadap Tertib Administrasi Desa 81
3. Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa 88
C. Pembahasan …….. 93
1. Pemahaman Aparatur Desa Terhadap Tertib Administrasi Desa 94
2. Keterampilan Aparatur Desa Terhadap Tertib Administrasi Desa 96
3. Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa 98

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa 5
2. Sejarah Pemerintah Desa..... 62
3. Jumlah Penduduk Desa Tiuh Tohou 64
4. Jumlah Penduduk Mata Pencaharian 64
5. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan 65
6. Jumlah Personil Pemerintah Desa 68
7. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa 69
8. Struktur Badan Permusyawaratan Desa 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir..... 50

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulirnya era reformasi yang berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip–prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi masing–masing.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga berdampak pada tataran pemerintahan kecamatan dan desa, yaitu kecamatan tidak lagi menjalankan urusan–urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah desa dalam melaksanakan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Pengaturan tentang administrasi desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan diatasnya. Selain itu tujuan dari administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Namun, masih adanya permasalahan terkait pelaksanaan tertib administrasi desa dalam hal pelaksanaan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan administrasi desa karena keterbatasan sumber daya pemerintahan desa. Maksudnya aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dalam menyusun tertib administrasi desa secara baik dan benar. Hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari aparatur desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas aparatur yang baik maka penyelenggaraan pemerintahan

desa akan berjalan dengan baik juga. (Sumber: Itpni.Org/permasalahan-desa-opini-lendi-wibowo)

Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Namun, demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan desa yaitu desa atau kelurahan justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya. Terbukti kondisi desa dari dulu hingga sekarang tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan. Berbagai kendala dialami oleh desa dalam melakukan Administrasi Desa, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa. (www.kemendesa.go.id./berita/1507/dana-desa-dapat-meningkatkan-kapasitas-desa)

Desa masih sangat tergantung dari bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengurusi segala permasalahan yang ada di wilayahnya. Pemerintah desa sebagai pionir dalam melaksanakan administrasi desa belum mampu

melakukan fungsi dan perannya dengan baik. Kapasitas Sumber daya aparatur desa yang masih jauh dari ideal disinyalir menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan administrasi desa. Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi desa.

Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal. Kualitas tersebut selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan ,tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan .

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan pada 30 Oktober 2015 di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Desa Tiuh Tohou belum menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan tertib administrasi desa. Hal ini dapat dillihat dari masih kosongnya buku-buku administrasi desa, padahal seharusnya buku tersebut dapat terisi sesuai dengan perintah Undang–Undang Nomor 32 tahun 2006. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kurang mempuninya kapasitas aparatur Desa Tiuh Tohou dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait tertib administrasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Gunawan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan Menggala Kota menyatakan masih Lemahnya kapasitas sumber daya manusia disebabkan oleh para aparat desa yang belum memiliki kemampuan yang terampil dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan memuaskan sedangkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan antar aparat dalam pemerintah desa menyebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara aparat Desa Tiuh Tohou tersebut.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparat dalam melaksanakaan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugas nya terutama dibidang administrasi. Berikut ini merupakan daftar tingkat pendidikan aparatur Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang :

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Tiuh Tohou

No. (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Pendidikan (4)
1	Ali Rahman	Kepala Desa	SMA
2	M. Yasmin	Seketaris	SMA
3	Erma Suri	Bendahara	S.KOM
4	Yantina	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SMP
5	Hartito	Kepala Urusan Umum	SMA
6	Adham Maulana	Kepala Urusan Pembangunan	SMP
7	Nining Kurning	Kepala Urusan Pemerintahan	SMP
8	Desi	Kepala Keuangan	SMP
9	Elwir. D	Kepala Dusun I	SD
10	Slamet. H	Kepala Dusun II	SMP
11	Djunar	Kepala Dusun III	SD
12	Hermaluk	Kepala Dusun IV	SD
13	Ahsayuti	Ketua Anggota BPD	SMA

(Sumber: Wawancara Prariset Kepada Bapak Ali Rahman , Kepala Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Juma’t 30 Oktober 2015 jam 14.00 WIB)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan aparatur Desa Tiuh Tohou masih rendah . Hanya satu aparat yang berpendidikan Sarjana, sedangkan aparat yang lain hanya berpendidikan SMA dan SMP bahkan ada yang berpendidikan SD. Kepala desa selaku pemimpin desa dan sekertaris desa selaku aparat yang menangani bidang administrasi hanya berpendidikan SMA, namun aparatur desa harus memiliki kualitas pendidikan yang memadai dan juga harus disertai kedisiplinan yang tinggi sehingga dapat merealisasikan tertib administrasi desa dengan baik.

Selain masalah tingkat pendidikan yang rendah, masalah lain yang menyebabkan Pemerintah Desa Tiuh Tohou kurang nya Kapasitas dalam melaksanakan tertib Administrasi Desa ialah tidak adanya pelatihan berkelanjutan terkait pelaksanaan Administrasi Desa oleh pihak Kecamataan Menggala Kota. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan Menggala pada tanggal 9 Febuari 2016 pukul 10.00 WIB yang menyatakan, bahwa Pemerintah Kecamatan Menggala hanya sekali memberikan pengarahan atau pelatihan terkait dengan pelaksanaan Administrasi Desa sejak awal dibentuknya Desa Tiuh Tohou hingga sekarang.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur Desa Tiuh Tohou masih kurang optimal untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang administrasi. Atas pertimbangan inilah maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu “Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou Dalam Penertiban Administrasi Desa

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou Dalam Terib Administrasi Desa

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou dalam Tertib Administrasi Desa

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini merupakan salah satu kajian manjemen pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kapasitas aparatur desa terhadap tertib administrasi desa.

2. Secara Praktis

   Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikirian, masukan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam tertib administrasi desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kapasitas

Ada banyak definisi kapasitas yang telah dikemukakan oleh para pakar. Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010 : 10), "kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu".

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010 : 12) menyatakan bahwa, "kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan". Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010 : 09) mendefinisikan "kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator dari kapasitas adalah:

1. Pemahaman

   Memahami dalam melaksankan tugas dan fungsi pokoknya.

2. Keterampilan

   Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

3. Kemampuan

   Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, dan kapasitas dapat di ukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan, kemampuan.

B. Tinjauan Tentang Pengembangan Kapasitas

1) Pengertian Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Dalam pengertian pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) perkembanganya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *Capacity Building* merupakan konsep yang universal dan memililki dimensi yang beragam. Brown (Rainer Rohdewohld, 2005 : 11) mendefinisikan *"Capacity building is a process that in crease the ability of persons, organisations or systems to meet its*

stated purposes and objectives". Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa *Capacity Building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Gandara 2008 : 9) bahwa *Capacity Building* adalah sebuah proses untuk meningkatkan induvidu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu definisi *Capacity Building* menurut Grindel dalam Keban (2008 : 201) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapatan bahwa:

Capacity building merupakan serangkaian strategi ditunjukan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Berdasarkan definisi Capacity Building di atas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan, yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. Hal senada juga dikemukan oleh Katty Sensions (1993 : 15) yang mendefinisikan bahwa :

> "*Capacity Building usually is understood to mean helping goverments, communities and induviduals to develop the skills and experitse needed to achieve their goals. Capacity Building program, often design to strengthen strengthen participant's abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively , may include education and training , instituional and legal reforms , as scientific , technologi and financial assitance"*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menjelaskan bahwa pengertian *Capacity Building* biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau induvidu-induvidu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Program *Capactity Building* (pengembangan kapasitas) pada dasarnya di desain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menajalankan keputusan-keputusan dengan efektif. Pengembangan kapasitas termasuk didalamnya pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, pengetahuan, tekhnologi dan juga asistensi finensial. Pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri.

Menurut Eade dalam Kumurotomo dan Widaningrum (2010 : 17) pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. pengembangan kapasitas

umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun induvidu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (2001) mendefinisikan bahwa *capacity building* adalah pembangunan atau peningkatan kemampuan (kapasitas) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan *out-put* dan *out-come* pada kerangka tertentu. kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas adalah suatu kemampuan. Sedangkan pengembangan kapasitas (*capacity building)* adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik dalam organisasi, aparatur (sumber daya manusia), dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan keputusan-keputusan secara efektif.

2) Tujuan Pengembangan Kapasitas

Menurut Keban (2007 : 7) bahwa *capacity building* (pengembangan kapasitas) adalah serangkaian strategi yang ditunjukan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, responsifitas dan kinerja.

Lebih lanjut Morison (2001 : 23) mengatakan bahwa :

> *"Learning is a process, which flows from the need to make sense out of experince, reduce the unkown and uncertain dimensions of life and build the competencies required to adapat to change"*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari *capacity building* (pengembangan kapasitas) adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradapatasi menghadapi perubahan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan *capacity building* (pengembangan kapasitas)dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Secara umum di identikkan pada perwujuddan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
b. Secara khusus ditunjukkan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
    1) Efesiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome.*
    2) Efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
    3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
    4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja induvidu, grup, organisasi dan sistem.

3) Fokus Pengembangan Kapasitas

Untuk menilai fokus dari pengembangan kapasitas banyak kriteria yang digunakan, akan tetapi sangat sulit untuk menentukan secara tepat fokus yang mempengaruhi kapasitas. Oleh karena itu, melakukan peninjauan terhadap berbagai pendapat para ahli maupun melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengembangan kapasitas menurut pendapat Bank Dunia dalam Keban (2008 : 202) yang mencakup peningkatan kemampuan kepada:

a. Pengembangan sumber daya manusia.
b. Organisasi yaitu peraturan strukturm proses, sumberdaya, dan gaya manajemen.
c. Jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal.
d. Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undang yang mengatur pelayan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran.
e. Lingkunagan kegiatan yang luas,yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Grindle dalam Kumortomo dan Widaningrum (2010 : 32) membedakan langkah-langkah pengembangan kapasitas atas tiga kelompok, yakni pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi dan kelembagaan. Djumadi (2006 : 153) menyatakan bahwa

pengembangan kapasitas harus dilakukan secara efektif melalui tiga tingkatan yaitu :

a. Tingkat sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu.
b. Tingkat institusional atau keseluruhan satuan, contoh: struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, penguatan sarana dan prasana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi.
c. Tingkat individu, contohnya pengembangan keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang didalam organisasi.

Dilakukannya ketiga tingkatan tersebut secara efektif dan berkesinambungan maka akan memberikan hasil yang berpengaruh kepada *good governance*, sehingga dalam pengembangan kapasitas tersebut akan menghasilkan tenaga- tenaga profesional yang mampu dalam kapasitas teknis.

4) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas (capacity building) dalam pemerintahan desa. Namun secara khusus, faktor-faktor yang

mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi hal lima yaitu, komitmen besama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006 : 154-156)

a. Komitmen bersama (*collective commitments*) dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintah desa), hal ini sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas untuk bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
b. Kepemimpinan (*Leardership*). Faktor kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas. Dalam kontek lingkungan organisasi publik, harus terus menerus di dorong oleh mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan realitas keterbatasan summber daya yang dimiliki sektor publik, selain itu gaya kepemimipinan merupakan

salah satu pendorong efektifitas suatu kelompok organisasi. (Fiedler dalam Sugandi, 2011 : 135).

c. Reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan desa di Indonesia serta aparatur desa yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta faktor legal formal proseural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi peraturan merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.

d. Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian yang penting dari reformasi kelembagaan. Reformasi kelembangaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas induvidu dan kelembangaan menuju pada realitas tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan desa di Indonesia.

e. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang

tersedia. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimilki merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Berdasarkan pemaparan di atas faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah; Komitmen bersama, Kepemimpinan, Reformasi peraturan, Reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam penertiban administrasi desa.

5) Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah

Ada banyak bentuk yang dapat dipilih dalam model pengembangan sumber daya aparatur pemerintah desa. Namun, demikian perlu adanya *framework* adanya pengembangan yang relevan bagi setiap aktivitas yang ada. Misalnya, bidang-bidang strategis dalam rencana strategi Pemerintah Desa juga seharusnya menentukan jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di desanya khusunya bagi keperluan lembaga atau insitusi pemerintah desa. Pengelaman menunjukan bahwa seringkali pengembangan sumber daya manusia tidak dikaitkan dengan kebutuhan strategis desa itu sendiri. Pegembangan dalam konteks sumber daya manusia ini hendaknya difokuskan pada pengembangan:

a. Menyatakan keterampilan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan di bidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang saat ini

dan tugas-tugas yang akan dilakukan memerlukam kemampuan khusus.

b. Wawasan dan pengetahuan.
c. bakat dan potensi.
d. Kepribadian dan motifasi kerja.
e. Modal dan etos kerja.

Konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia (Notoatmodjo, 2009 : 17). Menurut Nooatmodjo (2009 : 17) pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia atau aparatur desa yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut.
b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan tekhnologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi atau instansi.
c. Promosi dalam suatu organisasi atau insitusi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau berkembang.

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkam bahwa pengembangan kapasitas difokuskan khususnya sumber daya manusia (aparatur desa) yaitu pemberian pelatihan (*trainning*) yang terdiri dari

pengembangan wawasan, bakat, potensi, kepribadian, modal dan etos kerja dalam menunjang penertiban administrasi desa.

Menghasilkan sumber daya manusia atau aparatur desa yang efektif dan efesiensi dan agar pengembangan sumber daya manusia di desa lebih mengenai sasaran, maka dalam *capacity building* perlu diperhatikan empat fase dasar yang akan dilalui Grindle dalam Djumadi (2004: 158) yaitu:

a. Fase desain *(a design phase),* meliputi keterlibatan pihak-pihak atau donor *consituency* tertentu yang bisa menghasilkan masukan (*resulting in*) bagi strategi pengembangan sumber daya manusia, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintahan desa misalnya, kepala desa, seketaris desa, kepala urusan pemeintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan keuangan, dan kepala BPD.
b. Fase implementasi proyek *(project implemention phase*) dimana menyeleksi kontraktor pelaksana atau unit-unit administrasi tertentu untuk memulai dam mengimplementasikan suatu program.
c. Fase akusisi kemampuan *(a acquisition phase),* dari berbagai kegiatan informal yang di dapat akan membentuk keahlian-keahlian baru termasuk mengasah wawasan, bakat, potensi, dan etos kerja.
d. Fase pencapaian atau kinerja (*performance phase*) dimana kemampuan induvidu akan termanifestasikan dalam peralihan tugas dan hasil evaluasi akhir. Hal ini yang perlu diperhitungkan dari setiap fase-fase tersebut adalah adanya pengaruh lain berupa

kejadian-kejadian yang mungkin tidak bertalian dengan program misalnya, rotasi jabatan, perubahan politik, konflik sosial, dan sebagainya, yang seringkali menyebabkan program pengembangan sumber daya manusia terkesan serba instan dan mengalami stagnasi.

Hal senada juga disampaikan Werther dan Davis dalam Notoatmojo (2009 : 96), dalam menentukan kebutuhan dari segi kuantitas sumber daya manusia (aparatur desa), diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang merupakan inti administrasi sumber daya manusia karena sumber daya manusia merupakan suatu perkurangan tentang kebutuhan atau pasokan tenaga kerja sehingga jumlah dan tipe kebutuhan dapat terencana dengan baik.

Berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, dalam menentukan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melaluai analisis baik di tingkat organisasi, jabatan, atau pekerjaan maupun induvidu dengan tujuan (Notoatmodjo,2009 : 19-21):

a. Analisis tingkat organisasi untuk mengetahuai dibagian mana dalam bagian organisasi yang memerlukan pelatihan. Setelah itu dipertimbangkan biaya, alat dan perlengkapan yang digunakan.
b. Analisis di tingkat jabatan atau tugas atau pekerjaan (*job analysis*) untuk mengidentifikasi isi pelatihan yang dibutuhkan, artinya apa yang harus diajarkan atau diberikan dalam pelatihan agar para karyawan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan secara efektif.

c. Analisis tingkat individu yaitu untuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan macam apa, artinya kemampuan dan keterampilan yang masih diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan jabatan.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan manusia seperti kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tiuh Toho dalam menjalankan penertiban admninistrasi desa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada, sumber daya manusia atau aparatur desa yang bersumber dari potensi yang ada di dalam diri Pemerintah Desa Tiuh Toho dan merupakan modal dasar organisasi untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintah dengan baik dan menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.

C. Tinjauan Tentang Kemampuan

1. Pengertian Kemampuan

Kemampuan seorang aparatur berbeda-beda, kemampuan didapat dari kecerdasan ataupun bakat dari aparatur tersebut. Pengertian kemampuan menurut Moenir bahwa:

> "Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakuka tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan"
> (Moenir, 2002:116).

Sedangkan menurut Miftah Thoha sebagaimana dikutip oleh Nayono dalam buku Mengenal Kehidupan Berorganisasi bahwa:

> "Kemampuan adalah salah satu unsur dari kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman"
> (Nayono,1998:19)

Soelaiman (2007:112) kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tdak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Lalu menurut Stephen P. Robins (2006,46) Kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat factor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan phisik.

Sedangkan menurut Mc Shane dan Glinow dalam Buyung (2007:37) :

> "ability is the natural aptitudes and learned capabilities required to successfully complete a task (kemampuan adalah kecerdasan-kecerdasan alami dan kapabilitas dipelajari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas)."

Berdasarkan teori di atas, kemampuan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan ketarampilannya. Kaitannya dengan penelitian ini ialah kemampuan aparatur merupakan salah satu faktor penunjang kemampuan pemerintah desa Tiuh Tohou untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dalam masalah administrasi desa. Karena setiap organisasi membutuhkan pengelola, dan pengelola tersebut tidak lain adalah aparatur yang terdapat didalamnya.

Kemampuan aparatur desa dalam penelitian ini dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiataan
2. Mampu memberikan pertanggungjawaban kepada atasan
3. Paham dan terampil dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.

D. Tinjauan Tentang Keterampilan

1. Pengertian Keterampilan

Pada dasarnya keterampilan merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada kemampuan dan pengalamannya. Keterampilan kerja memiliki manfaat yang besar bagi individu,perusahaan dan masyarakat. Bagi individu keterampialn kerja dapat meningkatkan prestasinya sehingga memperoleh balas jasa yang sesuai deangan prestasinya.

Menurut Banmbang Wahyudi (2002 : 33) yaitu Keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suattu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktek, Keterampilan kerja ini dapat dikelompokan tiga kategori, yaitu sebagai beriku:

a. Keterampilan mental, seperti analisa, membuat keputusan, menghitung, menghapal.

b. Keterampilan fisik, seperti keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri.

c. Keterampilan social, yaitu seperti dapat mempengaruhi orang lain, berpidato, menawarkan barang, dan lain-lain.

Begitu juga pernyataan dari Tovey, M (dalam Irianto, 2001:76) mengartikan skill tidak hanya berkaitan dengan keahlian seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat *tangible*. Selain *physical*, makna skill juga mengacu pada persoalan mental, manual, motorik, persepsi dan bahkan *social abilities* seseorang. Sedangkan Rais dan Saembodo (1996:18) mengatakan bahwa Ketrampilan atau keahlian (skill) adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknis atu non-teknis.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap aparatur karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya. Keterampilan seseorang aparatur desa dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu :

1. Ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
3. Kesesuaian hasil pekerjaan.

2. Dasar-dasar Keterampilan

Menurut Robbins (2000 : 494-495) pada dasarnya ketrampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Basic literacy skill

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan mendengar.

b. Technical skill

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer.

c. Interpersonal skill

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.

d. Problem solving

Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan logika, beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

E. Tinjauan Tentang Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang aparatur desa dikatakan memahami tugas dan fungsinya apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang ia pahami dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, pemahaman seorang aparatur desa dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki

2. Pelatihan Teknis yang pernah diikuti
3. Penguasaan secara mendalam pekerjaan tersebut.

(Sutermeister : 1976)

F. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintahan

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2007:444) menyatakan:

> "Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah".

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu aktivitas atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kelompok yang memegang kuasa untuk memerintah orang-orang atau masyarakat yang di bawah ruang lingkup pemerintahannya.

Samual Edward Finer (1989) mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit yaitu:

a. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

b. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Pengertian di atas menggariskan bahwa pemerintah secara umum adalah suatu peran yang dijalankan dalam suatu wilayah oleh pemerintah dengan cara menciptakan fungsi dan struktur suatu perangkat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) menyatakan:

> "Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang ada pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayangkannya".

Menurut Kansil (1995 : 25) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah:

a. Meliputi segenap lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945
b. Presiden berdasarkan pernyataan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dan dengan persetujuan DPR
c. Badan pemerintahan dipusat yang menentukan haluan Negara serta instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu badan yang mempunyai kekuasaan dan berwenang dalam mengatur rakyat dan negaranya yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakam kempimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga- lembaga dimana mereka tempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus maslah keanegraan dan kesajahteraan rakyat dan negara.

2. Pengertian Desa

Menurut Mutty (1990:38) desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimiliki telah mendapatkan pengakuan jauh sebelum dilaksanakan pemerintah dengan asas desentralisasi. Desa menurut HAW. Widjaja (2005:148), desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyrakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dinyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003 : 3), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaran pemerintah, sehingga desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan menyatakan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksaanan tersebut kepada Bupati.

Menurut Tumpal P. Saragih (2000:71)menyatakan:

> "Pengertian pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa atau disebutkan dengan nama lain dan perangkat desa. Kepala desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa tersebut".

Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah: Pemerintahan desa menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa. Susunan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah dan desa BPD. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Sedangkan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Sirajuddin, dkk, 2008 : 101).

Susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di desa dapat dibentuk lembaga lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, berupa lembaga kemasyarakatan, diantaranya: rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu Pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa (Rozali Abdullah, 2005 : 171).

Namun, desa jika dijabarkan dalam pengertian yang lebih luas lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas pembahasan luas wilayah secara fisik saja, tetapi desa juga mempunyai karakter sosial yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kebanyakan dari factor sosial itulah sering mempengaruhi kemajuan desa.

Didalam sumber lain juga di katakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintahan desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat atau desa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaanya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah camat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang di pimpin oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai perangkat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2008 : 27) menyatakan

> "Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya".

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan

pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Pasal 19 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul.
b. kewenangan lokal berskala Desa.
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyrakat.

4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5) Membina kehidupan masyarakat Desa
6) Membina ekonomi desa
7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekertaris Desa

1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2) Fungsi :
   a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Umum (KAUR)

1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2) Fungsi :
   a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
   b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
   c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
   d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
   e) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
   f) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
   g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kaur Keuangan

1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2) Fungsi :
   a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
   b) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
   c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kaur Pemerintahan

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2) Fungsi :
   a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
   b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
   c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
   d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
   e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

f. Kaur Pembangunan

1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2) Fungsi :

a) Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan

b) Pengelolaan tugas pembantuan; dan

c) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2) Fungsi :

a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

1) Tugas

a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat

d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2) Fungsi

a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun

b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat

e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

i. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1) **Tugas :**

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

f) Menyusun tata tertib BPD.

2) **Hak :**

a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa

b) Menyatakan pendapat Kewajiban

c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

e) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI

f) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
g) Memproses pemilihan kepala desa
h) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
i) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
j) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

G. Tinjauan Tentang Tertib Administrasi Desa

1. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu disebut Administrasi. Sondang P. Siagian mengemukakan:

> "Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua

> orang manusia atau lebih untuk mencapai tujauan yang telah ditentukan sebelumnya" (Kencana, 2003 : 5)"

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Menurut (Silahi, 2009 : 10) ciri-ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi:

a. Sekelompok orang; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang
b. Kerja sama; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
c. Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
d. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
e. Tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2007 : 1):

> "Administrasi dapat diartikam sebagai fungsi, yaitu dalam hal fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan administrasi negara adalah organisasi dan management keseluruham aparatur pemerintah negara dengan cara yang setepat-tepatnya".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri pokok administrasi terdiri dari sekelompok orang. Administrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sekelompok orang. Tidak hanya sekelompok orang saja yang dibutuhkan, namun kerja sama sangat dibutuhkan yang dilakukan dalam dua orang atau lebih. Ciri administrasi yang lain yaitu

pembagian kerja dimana kegiatan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas. Sedangkan kegiatan yang runtut dalam suatu proses yaitu kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan. Ciri pokok dari administrasi yang lain yaitu tujuan, dimana sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Menurut R. D .H Koesoemahatmadja (1979 : 5):

> "Administrasi Pemerintahan Daerah adalah merupakan sub sistem darpada Pemerintah Nasional, maka administrasi pemerintah daerah dapat dikatakan merupakan "segenap prose dalam penyelenggaraan wewenang Daerah Otonom untuk kepentingan sekelompok penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini berkaitan pula bahwa daerah sesungguhnya merupakan bagian daripada negara dengan tujuan yang sama jadi haketkatnya adalah Negara juga. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari administrasi daerah juga sama yakni ilmu administrasi negara."

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas maka administrasi dapat dipandang sebagai proses dan dapat dipandang sebagai fungsi. Administrasi sebagai suatu proses yaitu serangkaian kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sebagai pelaksana (aparatur) yaitu yang melakukan, melaksanakan serangkaian kegitan tadi. Disamping itu admnistrasi dapat juga diartikan sebagai insitusi, yaitu suatu tatanan yang rapi di mana berlangsung rangkaian kegiatan tadi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya.

2. Pengertian Tertib Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006:

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
    1) Buku Data Peraturan Desa;
    2) Buku Data Keputusan Kepala Desa;
    3) Buku Data Inventaris Desa;
    4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
    5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
    6) Buku Data Tanah di Desa;
    7) Buku Agenda; dan
    8) Buku Ekspedisi.
b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
    1) Buku Data Induk Penduduk Desa;
    2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
    3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
    4) Buku Data Penduduk Sementara.

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
   1) Buku Anggaran Penerimaan;
   2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
   3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
   4) Buku Kas Umum;
   5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;
   6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
   7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
   1) Buku Rencana Pembangunan;
   2) Buku Kegiatan Pembangunan;
   3) Buku Inventaris Proyek; dan
   4) Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
   1) Buku Data Anggota BPD;
   2) Buku Data Keputusan BPD;
   3) Buku Data Kegiatan BPD;
   4) Buku Agenda BPD; dan

5) Buku Ekspedisi BPD.

f. Administrasi lainnya

Agar berfungsinya organisasi dan terlaksananya managemen, maka yang terpenting pula diperhatikan adalah unsur komunikasi disamping unsur-unsur yang lain seperti, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan hubungan masyarakat (*human realition*). Dengan demikian maka akan terlihat bahwa administrasi itu meliputi seluruh kegiatan perorganisasian, managenebt, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan hubungan masyrakat.

H. Kerangka pikir

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010 : 10), "kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu".

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010 : 12) menyatakan bahwa, "kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan". Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto

(2010 : 09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Menurut Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa disebutkan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis administrasi desa terdiri dari administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan,administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan administrasi lainnya. Pengaturan tentang administrasi desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan diatasnya. Selain itu tujuan dari administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Berdasarkan hal di atas, maka kapasitas merupakan salah satu instrument penting dalam keberhasilan suatu organisasi, termasuk pemerintah desa. Terlaksananya tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sangat bergantung pada kapasitas dari aparatur desa tersebut. Salah satu tugas pemerintah desa adalah pelaksanaan administrasi desa, yang tentu memerlukan aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam melaksanakannya.

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010 : 10) kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu:

1. Pemahaman

   Memahami melaksankan tugas dan fungsi pokoknya.

2. Keterampilan

   Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

3. Kemampuan

   Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Berdasarkan teori tersebut penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kapasitas aparatur desa dalam Tertib Administrasi Desa Tiuh Toho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

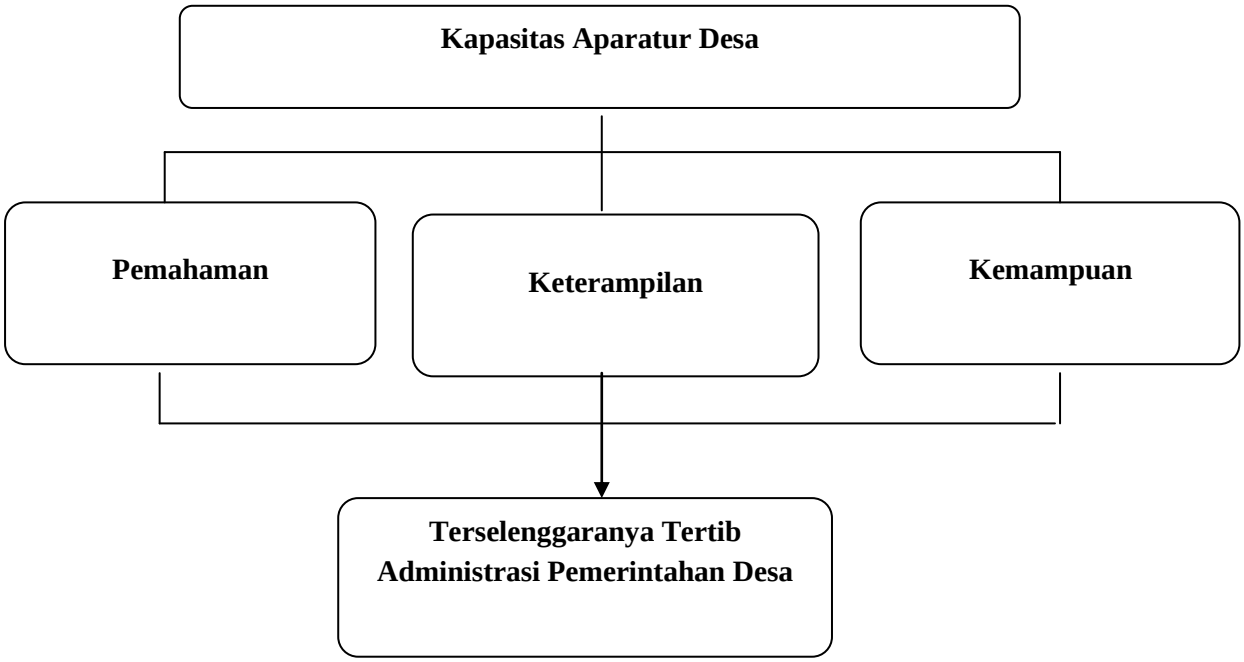

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Muhammad Nazir (2001 : 67), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.

Selanjutnya menurut Bugdon dan Taylor dalam Moeleong (2005 : 5-6):

> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,secara holistik, dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
>
> Penelitian kualitatif menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Peneltian kualitatif adalah prosedur analisais yang tidak menggunakan analisis stasitistik atau cara kuantifikasi/perhitungan.

Berdasarkan pengertian di atas maka tipe penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif, digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena berupa Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam Penertiban Administrasi Desa.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moeleong (2005 : 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah pada masalah Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Toho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam Tertib Administrasi Desa yang akan di lihat atau di ukur dari:

1. Pemahaman Aparatur Desa terhadap Administrasi desa dengan indikator
    a. Memahami Buku Administrasi Desa
    b. Penguasaan tata cara tertib Administrasi Desa
2. Keterampilan Aparatur Desa terhadap administrasi desa dengan indikator
    a. Teliti melaksanakaan tertib administrasi desa
    b. Cepat dan tangkas melaksanakan tertib Administrasi Desa
    c. Melaksanakan tertib Administrasi Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku
3. Kemampuan Aparatur Desa terhadap administrasi desa dengan indikator
    a. Mampu menyusun rencana kegiatan terkait penertiban Admini strasi Desa
    b. Mampu mempertanggungjawabkan data Administrasi Desa kepada pihak kecamatan.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah induvidu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan tekhnik *purposive sampling* yaitu, pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang berkaitan dengan Administrasi Desa.
2. Informan merupakan subyek yang masih secara penuh aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti
3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Camat Menggala Kota (Sudirman Bahusin. SE) : 1 orang
2. Tokoh Agama (Kodri) : 1 orang
3. Kepala Desa Tiuh Tohou (Ali Rahman) : 1 orang
4. Seketaris Desa Tiun Tohou (M. Yasin) : 1 orang
5. Kepala Urusan Pemerintahan (Nining Kurningsih) : 1 orang
6. Perwakilan Masyarakat Desa Tih Tohou (Aminah) : 1 orang
7. Ketua BPD Desa Tiuh Toho (Dewa Komang) : 1 orang

Jumlah : 7 orang

D. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung penelitian dari lapangan (Loftland Dalam Moleong, 2006:157). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap kepala desa Tiuh Tohou.

   Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive.*Alasan pemakaian teknik *purposive sampling* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan diambil oleh peneliti.

   Adapun yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Camat Menggala, Kasi Pemerintahan Menggala, Kepala Desa Tiuh Tohou, Seketaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Ketua BPD Tiuh Tohou, Perwakilan Masyarakat Desa Tiuh Tohou yang dapat memberikan jawaban atas penelitian ini, keseluruhan informan berjumlah 8 orang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi. Data tersebut dapat bersumber dari arsif, dokumen-dokumen, artikel-artikel maupun jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dan dapat diterima. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa Buku-Buku

Administrasi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Camat Menggala, Kepala Desa Tiuh Tohou, Seketaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Ketua BPD Tiuh Tohou, Tokoh Agama, Perwakilan Masyarakat Desa Tiuh Tohou yang dapat memberikan jawaban atas penelitian ini, keseluruhan informan berjumlah 7 orang.

2) Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2000) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Adapun data-data yang dimaksud yaitu berupa Buku-Buku Administrasi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

3) Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada objek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Desa Tiuh Tohou merupakan desa definitif yang masih membutuhkan waktu untuk desa tersebut dapat menjalankan pemerintahan nya sesuai dengan harapan masyarakat Desa Tiuh Tohou. Sebagai tugas dasar pemerintah, pemerintah Desa Tiuh Tohou wajib untuk melaksankan tugas administratif nya. Tugas administratif tersebut diaplikasikan dengan buku-buku administrasi desa yang mencakup bidang buku administrasi umum, buku administrasi kependudukan, buku administrasi BPD, buku administrasi pembangunan, buku administrasi keuangan desa.

Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi penelitian terlihat bahwa belum terlaksana nya tertib administrasi di Desa Tiuh Tohou karena aparatur desa tidak memperhatikan masalah administrasi desa.

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. adapun kegiatan pengolahan

data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006 : 278) adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justufikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mengcangkup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan Administrasi Desa yaitu data Buku-Buku Administrasi Desa yang terlihat tidak terisi atau tidak lengkap. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terlihat rendahnya kapasitas aparatur desa Tiuh Tohou dalam tertib administrasi desa.

2) Interpretasi Data

Yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai Kapasitas Aparatur Desa dalam tertib administrasi desa yang dikaitkan dengan pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

1. Pemahaman

   Untuk melakukan penarikan kesimpulan yang telah peneliti deskripsikan melalui tabel dan narasi berkaitan dengan pemahaman aparatur desa terhadap buku-buku administrasi desa. Dalam pemahaman terkait tertib administrasi desa, aparatur Desa Tiuh Tohou sudah dapat memahami tata cara pengisian buku administrasi desa. Namun pada proses pelaksanaannya aparatur desa belum dapat mengaplikasikannya kedalam buku-buku administrasi Desa.

2. Keterampilan

   Berdasarkan hasil observasi di Desa Tiuh Tohou bahwa aparatur desa kurang mmiliki keterampilan dalam pelaksanaan komputerisasi dan pengisian buku-buku administrasi desa. Dengan minimnya keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou maka buku-buku administrasi di Desa Tiuh Tohou masih banyak yang tidak lengkap atau tidak terisi.

3. Kemampuan

   Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemampuan aparatur desa secara keseluruhan cukup memiliki kemampuan. Namun kurangnya motivasi dari kepala desa terhadap aparatur desa membuat pelaksanaan tertib administrasi desa terbengkalai sehingga buku-buku administrasi masih banyak yang tidak lengkap dan tidak terisi, dan bukan hanya itu saja faktor tidak terlaksananya tertib administrasi desa disebabkan oleh aparatur desa yang malas atau tidak rajin dalam bekerja.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Tekhnik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dari dokumentasi, melaluai tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Kapasitas Aparatur Desa dalam tertib administrasi desa dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil analisa di lapangan, Kapasitas aparatur desa dalam tertib administrasi desa masih belum melaksanakan tertib administrasi desa dan masih banyaknya buku-buku administrasi yang tidak lengkap atau tidak terisi.

2. Penyajian Data

Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, grafik atau bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan di gunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3. Mengambil kesimpulan data dan verfikasi Data

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai kapasitas aparatur desa dalam tertib administrasi desa kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Tiuh Tohou

Desa Tiuh Tohou asal mulanya merupakan belantara dengan status tanah marga yang bermaksud dalam wilayah Pemerintah Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala seiring dengan pesatnya penduduk di pulau jawa, pada tahun 1980 mulailah berdatangan penduduk dari pulau jawa melalui transmigrasi swakarsa, pada tahun 1980 para penduduk atau pendatang membuka hutan belantara wilayah ini untuk menjadikan lahan pertanian. Maka dari itu sebagian besar suku bahasanya bermacam-macam karena faktor kesuburan tanah untuk dijadikan lahan pertanian wilayah ini. Jumlah penduduk pendatang dari tahun 1980 meningkat dengan cepat sampai dengan saat ini.

Oleh karena itu pada tahun 1980 diresmikan pembentukan Dusun di Wilayah Ujung Gunung Ilir Menggala menjadi lima dusun yaitu Dusun Tiuh Tohou, Dusun Cimangguk, Dusun Geduang Dalam, Dusun Sri Rahayu, Dusun Tegal Rejo dan Dusun Pujo Rahayu. Mengingat sangat luasnya wilayah Desa Induk Ujung Gunung Ilir tepatnya pada tanggal 03-09-2009 diadakan rapat pembentukan/pemekaran Desa Induk Ujung Gunung Ilir menjadi tiga desa yaitu Desa Tiuh Tohou, Ujung Gunung Ilir dan Kagungan Rahayu, Ujung

Gunung Ilir Barat menjadi Tiuh Tohou Ujung Gunung Utara menjadi Kagungan Rahayu.

Pada tanggal 03-09-2009 Desa Ujung Gunung Ilir resmi dimekarkan menjadi Desa Tiuh Tohou berdasarkan Keputusan Bupati Nomor SK.2T/71/01/HK/TB/201. Pejabat sementara kepala desa pada saat pemekaran dijabat oleh Bapak Ali Rahman, DN. Setelah selama 1 tahun 1 bulan tepatnya pada tanggal 03-09-2009 Desa Tiuh Tohou naik sttusnya menjadi Desa Definitif.

B. Sejarah Pemerintah Desa Tiuh Tohou

Tabel 1.2 Sejarah Pemerintah Desa
Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Desa
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Tiuh Tohou

No (1)	Priode (2)	Nama Kepala Desa (3)	Keterangan (4)
1	1982-1987	Waka Megou	
2	1987-1990	Samsu Rizal	
3	1990-2002	Samsuri Alam	
4	2002-2004	Sarimin	
5	2005-2009	Wayan Tirta	
6	2009 s/d sekarang	Ali Rahman	Pemekaran Desa

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

C. Keadaan Geografis Desa Tiuh Tohou

Batas Wilayah Desa adalah Sebagai Berikut:

1. Sebelah Utara : Kampung Menggala Selatan
2. Sebelah Selatan : Desa Bujung Tenuk/ Desa Astra Ksetra
3. Sebelah Barat : Ujung Gunung Ilir
4. Sebelah Timur :PT. SGL/ PT. Set Indo Lampung

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

D. Luas Wilayah Desa Tiuh Tohou

Luas Wilayah Desa Tiuh Tohou adalah sebagai berikut:

1. Pemukiman :425 Ha
2. Ladang/ Tegalan :385 Ha
3. Pertanian Sawah tadah hujan :250 Ha
4. Sekolah :263 Ha

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

E. Orbitasi Desa

Orbitasi atau Jarak Tempuh Desa Tiuh Tohou adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :9 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota :10,5 Km
3. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten :12,5 Km
4. Jarak dari Ibu Kota Provinsi :112 Km

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

F. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah: 2515 Jiwa yang terdiri dari 727 Kepala Keluarga (KK). Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Desa Tiuh Tohou

No (1)	Penduduk (2)	Jumlah (Jiwa) (3)
1	Laki –laki	1015 Jiwa
2	Perempuan	1500 Jiwa
3	Usia 0-15	1321 Jiwa
4	Usia 15-65	936 Jiwa
5	Usia 65 Ke Atas	258 jiwa

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

G. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Mengala Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian di Desa Tiuh Tohou

No (1)	Mata Pencaharian (2)	Jumlah (Jiwa) (3)
1	Pns/Tni/Polri	54
2	Karyawan Swasta	138
3	Petani	246
4	Tukang	24
5	Buruh Tani	817
6	Pensiunan	8
7	Nelayan	35
8	Pertenak	2
9	Jasa	27
10	Pengerajin	9
11	Pekerja Seni	67
12	Tidak Bekerja/Pengangguran	1088
Jumlah		**2515**

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Tiuh Tohou bekerja sebagai Petani/Pengarap Kebun/Ladang dengan jumlah 817 orang dan mata pencaharian penduduk

yang paling sedikit adalah Pertenak 2 orang. Angkatan yang tidak bekerja (usia sekolah,usia lanjut dan pengangguran) mencapai 1088 orang.

H. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Tiuh Tohou

No (1)	Jenjang Pendidikan (2)	Jumlah (3)
1	Tidak Bersekolah	64
2	Tidak Lulus Sekolah	26
3	Taman Kanak-Kanak	75
4	SD atau sederajat	291
5	SLTP atau sederajat	403
6	SLTA atau sederajat	398
7	DIPLOMA	105
8	SARJANA	77
9	PASCASARJANA	25
Jumlah		**1464**

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah tamatan SLTP atau sederajat dengan jumlah 403 orang, sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah pendidikan pascasarjana yaitu 25 orang.

I. Sarana dan Prasarana Desa Tiuh Tohou

a. Kantor Desa : Semi Permanen

b. Prasarana Kesehatan

1) Puskesmas : 1 Buah

2) Poskesdes : 1 Buah

3) UKBM (posyandu, polindes) : 1 Buah

c. Prasarana Pendidikan

1) Perpustakaan Desa : -

2) Gedung Sekolah PAUD : 1 Buah

3) Gedung Sekolah TK : 2 Buah

4) Gedung Sekolah SD : 1 Buah

5) Gedung Sekolah SLTP : 1 Buah

6) Gedung Sekolah SLTA : 1 Buah

7) Gedung Perguruan Tinggi : 1 Buah

d. Prasaran Ibadah

1) Masjid : 1 Buah

2) Mushola :4 Buah

3) Gereja : -

4) Pura : -

5) Vihara : -

6) Klenteng : -

e. Prasarana Umum

1) Olahraga :1 Buah

2) Kesenian atau Budaya : -

3) Balai Pertemuan :1 Buah

4) Sumur Desa : 9 Buah

5) Pasar Desa :1 Buah

6) Lainnya : RSUDM 1 Buah

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

J. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tiuh Tohou

Telah diketahui bersama bahwa yang dimaksud pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal ini Kepala Desa adalah merupakan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelengaraan Pemerintah Desa dan kedudukannya sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tiuh Tohou :

(1) Kepala Desa : Ali Rahman

(2) Sekretaris Desa : M. Yasmin

(3) Bendahara : Erma Suri, S.Kom

(4) Kepala Urusan Kesejahteraan : Yantina

(4) Kepala Urusan Umum : Hartito

(5) Kepala Urusan Keuangan : Desi

(6) Kepala Urusan Pemerintah : Nining Kurningsih

(7) Kepala Urusan Pembangunan : Adham Maulana

(8) Kepala Dusun I : Elwin D

(9) Kepala Dusun II : Slamet H

(10) Kepala Dusun III : Djunar

(11) Kepala Dusun IV : Hermaluk

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

2) Keadaan Perangkat Desa

(1) Personil Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Tiuh Tohou terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, seorang Bendahara Desa, Kepala Urusan Lima Orang Kepala Dusun Empat orang.

Tabel. 1.6. Personil Pemerintah Desa Tiuh Tohou

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)
1	Ali Rahman	Kepala Desa
2	M. Yasmin	Seketaris
3	Erma Suri, S.Kom	Bendahara
4	Yantina	Kepala Urusan Kesejahteraan
5	Hartito	Kepala Urusan Umum
6	Adham Maulana	Kepala Urusan Pembangunan
7	Ning Kurningsih	Kepala Urusan Pemerintahan
8	Desi	Kepala Urusan Keuangan
9	Elwin D	Kepala Dusun I
10	Slamet H	Kepala Dusun II
11	Djunar	Kepala Dusun III
12	Hermaluk	Kepala Dusun IV

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

(2) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tiuh Tohou masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.7. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tiuh Tohou

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Pendidikan (4)
1	Ali Rahman	Kepala Desa	SMA
2	M. Yasmin	Seketaris	SMA
3	Erma Suri, S.Kom	Bendahara	S.KOM
4	Yantina	Kepala Urusan kesejahteraan	SMP
5	Hartito	Kepala Urusan Umum	SMA
6	Adham Maulana	Kepala Urusan Pembangunan	SMP
7	Ning Kurningsih	Kepala Urusan Pemerintahan	SMP
8	Desi	Kepala Urusan Keuangan	SMP
9	Elwin D	Kepala Dusun I	SD
10	Slamet H	Kepala Dusun II	SMP
11	Djunar	Kepala Dusun III	SD
12	Hermaluk	Kepala Dusun IV	SD

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

K. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Tiuh Tohou

Berdasarkan Pengawasan peneliti terkait administrasi desa di Desa Tiuh Tohou bahwa adanya kordinasi yang baik antara seketaris dan kaur-kaur dibidangnya sehingga masih terdapat buku-buku administrasi desa yang tidak lengkap atau bahkan tidak terisi, antara lain:

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:

1) Buku Data Peraturan Desa :Terisi
2) Buku Data Keputusan Kepala Desa :Tidak terisi
3) Buku Data Inventaris Desa :Tidak lengkap
4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa :Tidak terisi

5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa :Tidak lengkap
6) Buku Data Tanah di Desa :Tidak lengkap
7) Buku Agenda :Tidak terisi
8) Buku Ekspedisi :Tidak terisi

b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
1) Buku Data Induk Penduduk Desa :Tidak lengkap
2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa : Tidak terisi
3) Buku Data Rekapitulasi :Tidak terisi
4) Buku Data Penduduk Sementara :Tidak terisi

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
1) Buku Anggaran Penerimaan :Terisi
2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin :Terisi
3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan :Terisi
4) Buku Kas Umum :Terisi
5) Buku Kas Pembantu Penerimaan :Terisi
6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin :Terisi
7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembanguna :Terisi

d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

1) Buku Rencana Pembangunan :Tidak terisi

2) Buku Kegiatan Pembangunan :Tidak terisi

3) Buku Inventaris Proyek :Tidak terisi

4) Buku Kader-Kader Pembangunan :Tidak terisi

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:

1) Buku Data Anggota BPD :Tidak Lengkap

2) Buku Data Keputusan BPD : Tidak terisi

3) Buku Data Kegiatan BPD : Tidak terisi

4) Buku Agenda BPD : Tidak terisi

5) Buku Ekspedisi BPD : Tidak terisi

(sumber: Pra Survei Peneliti pada Tanggal 10 Maret 2016 Pukul 13.00 di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

L. Kondisi Kantor dan Sarana Pemerintahan Desa

Kantor Desa sebagai sarana penyelengaraan Pemerintahan Desa Tiuh Tohou sebagai pusat pelayanan terhadap masyarakat desa kondisinya cukup memadai serta terawat dengan baik meski masih perlu pembangunan untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan sebagai pusat layanan publik Desa Tiuh Tohou.

(sumber: Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 10 Maret 2016 Pukul 13.00 di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

M. Kondisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Rakyat di Desa Tiuh Tohou yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, Kondisi BPD yang ada di Desa Tiuh Tohou selama ini belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena hubungan BPD dan Pemerintah Desa terjalin tidak harmonis dan kurang komunikatif, segala persoalan yang menyangkut kesejahteraan kehidupan masyarakat tidak selalu dimusyawarahkan bersama, adapun personal BPD Desa Tiuh Tohou adalah:

Tabel. 1.8. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tiuh Tohou

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)
1	Dewa Komang	Ketua
2	A.Sayuti	Wakil Ketua
3	Agung Widodo	Seketaris
4	Pagar alam	Bendahara
5	Dedi Dores	Anggota
6	Seleman	Anggota
7	Ali Hasan	Anggota
8	Abdullah Raden Umar	Anggota
9	Agus	Anggota
10	Purwadi	Anggota
11	Della. S	Anggota

(sumber: Monografi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang dalam Tertib Administrasi Desa, maka peneliti memberikan simpulan bahwa:

1. Aparatur Desa sudah memilki pemahaman namun belum memiliki kemauan dalam pengisian buku-buku administrasi desa. Belum adanya kemauan aparatur desa tersebut disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik atau tidak adanya kebersamaan antara aparatur desa dalam pengisian buku-buku administrasi desa sehingga mereka malas untuk mengisi buku-buku administrasi desa.
2. Aparatur Desa belum memiliki keterampilan dan ketangkasan dalam tertib administrasi desa disebakan oleh kurang nya peran dari Kepala Desa Tiuh Tohou dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa.
3. Aparatur Desa belum mampu mempertanggungjawabkan buku-buku administrasi desa kepada pihak Kecamatan Menggala. keterbatasan sumber daya manusia yang kurangnya sarana dan prasarana pengarsipan

dan sistem komputerisasi pengelolahan data administrasi desa juga menjadi kendala dalam tertib administrasi desa di Desa Tiuh Tohou.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran :

1. Pemerintah Kecamatan Menggala harus menerapkan sanksi kepada aparatur desa yang malas atau tidak melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan adanya penerapan sanksi tersebut maka aparatur desa lebih memperhatikan buku-buku administras desa.
2. Kepala Desa di Desa Tiuh Tohou harus melakukan pendampingan kepada aparatur Pemerintah Desa setelah mereka mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari Pihak Kecamatan Mengggala. disarankan mempunyai peran aktif meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan administrasi desa.
3. Kepala Desa Tiuh Tohou disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana pengarsipan dan sistem komputerisasi pengelolahan data administrasi desa sehingga pelaksana tertib administrasi desa di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang menjadi lebih optimal dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Ghalia indonesia.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwiyanto, Agus dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fahrudin Adi, 2001. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. PT Humaniora Utama Press.

Fujiartanto Agusta Ivanovich. 2014. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hariono Bambang Santoso. 2012. *Capacity Building*. Malang: UB PRESS.

Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembangaan*. AP2I Nasional.

Huda Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintah Desa* . Jawa Timur: Setara Pers.

Milen Anneli, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas.* Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Yogyakarta.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods.* California: SAGE Publications Inc.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Reevisi.* Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riyadi Soeprapto, MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank

Sabtoni, Anang dkk. 2005. *Prakarsa Desntralisasi dan Otonomi desa*. Yogyakarta: Ire. Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Bandung: Alpabeta.

Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.

Soemarman, T. 2013. Conflict *Management & Capacity Building For Profesional Development.* Jakarta: Alex Media Komputindo.

Sutarto. 1998. *Dasar- Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Widjaja, Haw. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Prenada Media

Yasen TP, 2014. *Revolusi Dari Desa : Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat.* Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Penelitian Terdahulu

Kardiasnyah Rahmad, 2014. *Kinerja Seketrais Desa Dalam Tertib Administrasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Ilmu Pemerintahan. Fisip Universitas Lampung

Sumber Jurnal

Djumdi, 2006. Pengembangan *Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Tatanan Pemerintah yang Baik (Jurnal sosial-politik).* Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman. Samarinda.

Jurnal Desentralisai. Pertiwi Retno Kartika. 2010. *Peningkatkan Kapasitas Aparatur Desa*. Pusat Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Dokumen atau Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Sumber Internet :

http://pengembangan-kapasitas.blogspot.co.id/. Diakses pada tanggal 30 November 2015 Pukul 19.00 WIB

http://lampost.co/berita/pemkab-tulangbawang-janji-insentif-aparat-kampung-dinaikkan. Diakses pada tanggal 30 November 2015 Pukul 19.15 WIB

http://verigifalnev.blogspot.co.id/2012/07/administrasi-desa_9002.html. Diakses pada tanggal 30 November 2015 Pukul 19.20 WIB

kejobongkec.blogspot.com/2011/10/kapasitas-aparatur-desa.html